

Lampiran

Berita 1



21:24

KOMPAS.com
JERMIN MELIHAT DUNIA

BACA HARIAN KOMPAS

JELAJAHI

Home > Money > Whats New

Skenario Terburuk Corona, Pemerintah Kaji Larangan Mudik Lebaran 2020

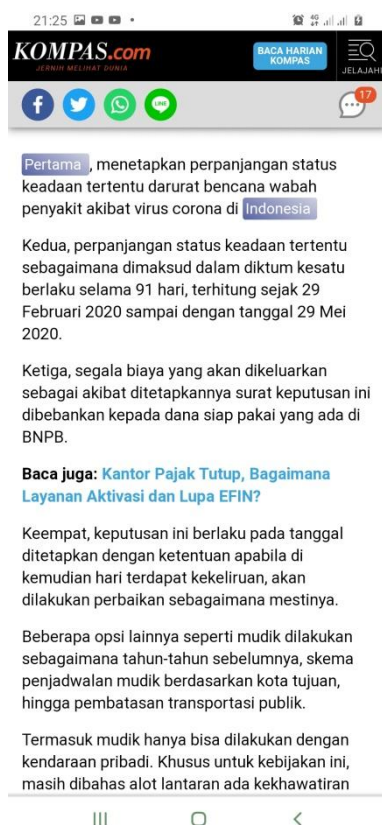
Minggu, 22 Maret 2020 | 09:48 WIB

Komentar (17)



Editor: Muhammad Idris

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membahas sejumlah langkah penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19. Salah satu skenario terburuknya, yakni pemerintah tengah mengkaji untuk melarang mudik Lebaran di tahun 2020.



21:25

KOMPAS.com
JERMIN MELIHAT DUNIA

BACA HARIAN KOMPAS

JELAJAHI

Pertama, menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia

Kedua, perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

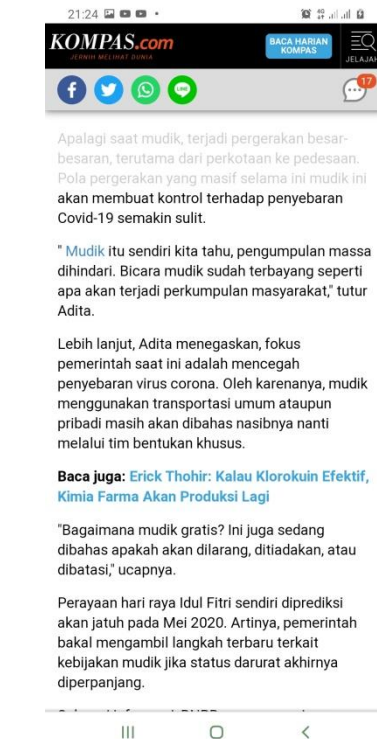
Ketiga, segala biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana siap pakai yang ada di BNPB.

Baca juga: Kantor Pajak Tutup, Bagaimana Layanan Aktivasi dan Lupa EFIN?

Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Beberapa opsi lainnya seperti mudik dilakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, skema penjadwalan mudik berdasarkan kota tujuan, hingga pembatasan transportasi publik.

Termasuk mudik hanya bisa dilakukan dengan kendaraan pribadi. Khusus untuk kebijakan ini, masih dibahas alot lantaran ada kekhawatiran



21:24

KOMPAS.com
JERMIN MELIHAT DUNIA

BACA HARIAN KOMPAS

JELAJAHI

Apalagi saat mudik, terjadi pergerakan besar-besaran, terutama dari perkotaan ke pedesaan. Pola pergerakan yang masif selama ini mudik ini akan membuat kontrol terhadap penyebaran Covid-19 semakin sulit.

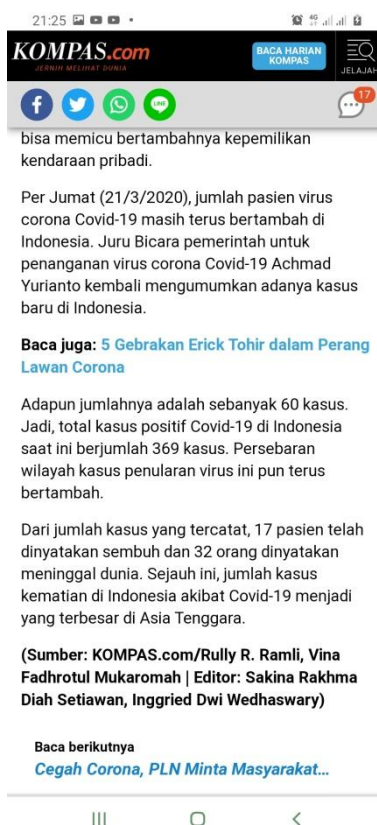
"Mudik itu sendiri kita tahu, pengumpulan massa dihindari. Bicara mudik sudah terbayang seperti apa akan terjadi perkumpulan masyarakat," tutur Adita.

Lebih lanjut, Adita menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah penyebaran virus corona. Oleh karenanya, mudik menggunakan transportasi umum ataupun pribadi masih akan dibahas nasibnya nanti melalui tim bentukan khusus.

Baca juga: Erick Thohir: Kalau Klorokuin Efektif, Kimia Farma Akan Produksi Lagi

"Bagaimana mudik gratis? Ini juga sedang dibahas apakah akan dilarang, ditiadakan, atau dibatasi," ucapnya.

Perayaan hari raya Idul Fitri sendiri diprediksi akan jatuh pada Mei 2020. Artinya, pemerintah bakal mengambil langkah terbaru terkait kebijakan mudik jika status darurat akhirnya diperpanjang.



21:25

KOMPAS.com
JERMIN MELIHAT DUNIA

BACA HARIAN KOMPAS

JELAJAHI

bisa memicu bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi.

Per Jumat (21/3/2020), jumlah pasien virus corona Covid-19 masih terus bertambah di Indonesia. Juru Bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto kembali mengumumkan adanya kasus baru di Indonesia.

Baca juga: 5 Gebrakan Erick Tohir dalam Perang Lawan Corona

Adapun jumlahnya adalah sebanyak 60 kasus. Jadi, total kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini berjumlah 369 kasus. Persebaran wilayah kasus penularan virus ini pun terus bertambah.

Dari jumlah kasus yang tercatat, 17 pasien telah dinyatakan sembuh dan 32 orang dinyatakan meninggal dunia. Sejauh ini, jumlah kasus kematian di Indonesia akibat Covid-19 menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

(Sumber: KOMPAS.com/Rully R. Ramli, Vina Fadhotul Mukaromah | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Inggried Dwi Wedhaswary)

Baca berikutnya
Cegah Corona, PLN Minta Masyarakat...



21:24

KOMPAS.com
JERMIN MELIHAT DUNIA

BACA HARIAN KOMPAS

JELAJAHI

Sebagai informasi, BNPB secara resmi memutuskan memperpanjang status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020. Ada empat poin keputusan dalam surat yang disahkan Kepala BNPB Doni Monardo tersebut.

penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19. Salah satu skenario terburuknya, yakni pemerintah tengah mengkaji untuk melarang mudik Lebaran di tahun 2020.

Beberapa skema memang mulai dibahas saat ini jika status darurat corona masih belum mengalami perubahan.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan, saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait sedang melakukan pembahasan terkait opsi pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini.

"Tadi didiskusikan apakah mudik akan dilakukan seperti biasa atau ada peninjauan ulang, atau bahkan ekstremnya dilarang. Tapi ini belum diputuskan," ujarnya dalam video conference, Jumat (20/3/2020).

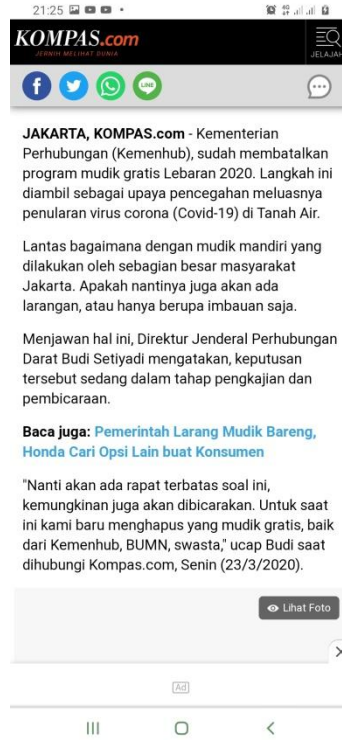
Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, BCA Hanya Beroperasi hingga Pukul 14.00

Opsi-opsi tersebut diambil untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Pasalnya, mudik identik dengan perkumpulan dan pergerakan masyarakat di satu titik. Hal tersebut menimbulkan potensi tinggi terjadinya penularan virus corona.

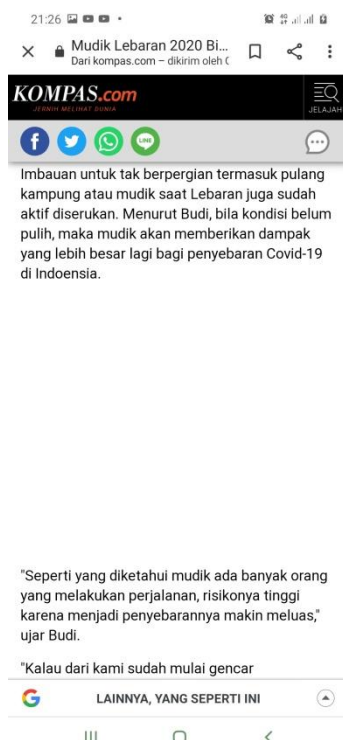
Apalagi saat mudik, terjadi pergerakan besar-

Lampiran

Berita 2



Budi menjelaskan, kondisi saat ini memang sangat tidak kondusif. Penyebaran virus corona setiap harinya makin meluas, karena itu pemerintah gencar meminta masyarakat untuk tak meninggalkan rumah.



Staf Khusus Menteri Perhubungan (Menhub) Adita Irawati mengatakan, saat ini Kemenhub dengan kementerian dan lembaga lainnya sedang melakukan pembahasan terkait opsi pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini.

"Tadi didiskusikan apakah mudik akan dilakukan seperti biasa atau ada peninjauan ulang, atau bahkan ekstremnya dilarang. Tapi ini belum diputuskan," ujar Adita yang dilansir dari [MonyeKompas](#).

Berita 3

21:27

KOMPAS.com
JERMIH MELIHAT SUNGAH


f t w u

IDI Dukung Wacana Larangan Mudik demi Cegah Penularan Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 12:00 WIB

f t w u

Komentar



Dok. Medial Sekarwangi

Sebelum berangkat menuju daerah tujuan, Bus Medalsekarwangi disemprot disinfektan di terminal.

Penulis: Dani Prabowo | Editor: Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mendukung, wacana pemerintah

"Itu sudah betul. Maknanya saya bilang, itu bukan petugas kesehatan yang bisa melakukan itu, tapi aparat keamanan. Diawasi tidak boleh itu keluar Jakarta, itu menyebarkan virus kemana-mana itu," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menganjurkan, agar masyarakat tidak pulang ke kampung halaman alias mudik pada musim lebaran tahun ini.

Keputusan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan pencegahan virus corona agar tidak menyebar lebih luas lagi ke penjuru Indonesia.

"Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," kata Jodi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Pasien Corona Bertambah di Kabupaten Bogor Akibat Gelombang Mudik dari Jakarta, Satu Remaja Perempuan Positif Corona

Namun anjuran dilarang mudik tersebut, lanjut Jodi, masih belum tahap keputusan akhir. Sebab, akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo

"Saya setuju itu. Dia disuruh tinggal dulu di rumah, jangan kemana-mana dulu dua minggu sampai sebulan. Itu nanti virus mati sendiri sudah tidak tersebar," kata Daeng kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2020).

Dari total 790 kasus positif Covid-19, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan penularan tertinggi dengan 463 kasus hingga saat ini.

Sementara diketahui, kenaikan presentase pemudik dari tahun ke tahun di kisaran 7 persen.

Tahun lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik Lebaran 2019 dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai 14,9 juta orang.

Baca juga: Antisipasi Pekerja Migran Mudik Lebaran, Rusunawa di Tulungagung Jadi Tempat Isolasi PDP Corona

Itu artinya, imbuh Daeng, diperlukan langkah ekstra agar penularan Covid-19 saat mudik, terutama bagi mereka yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, tidak terjadi.

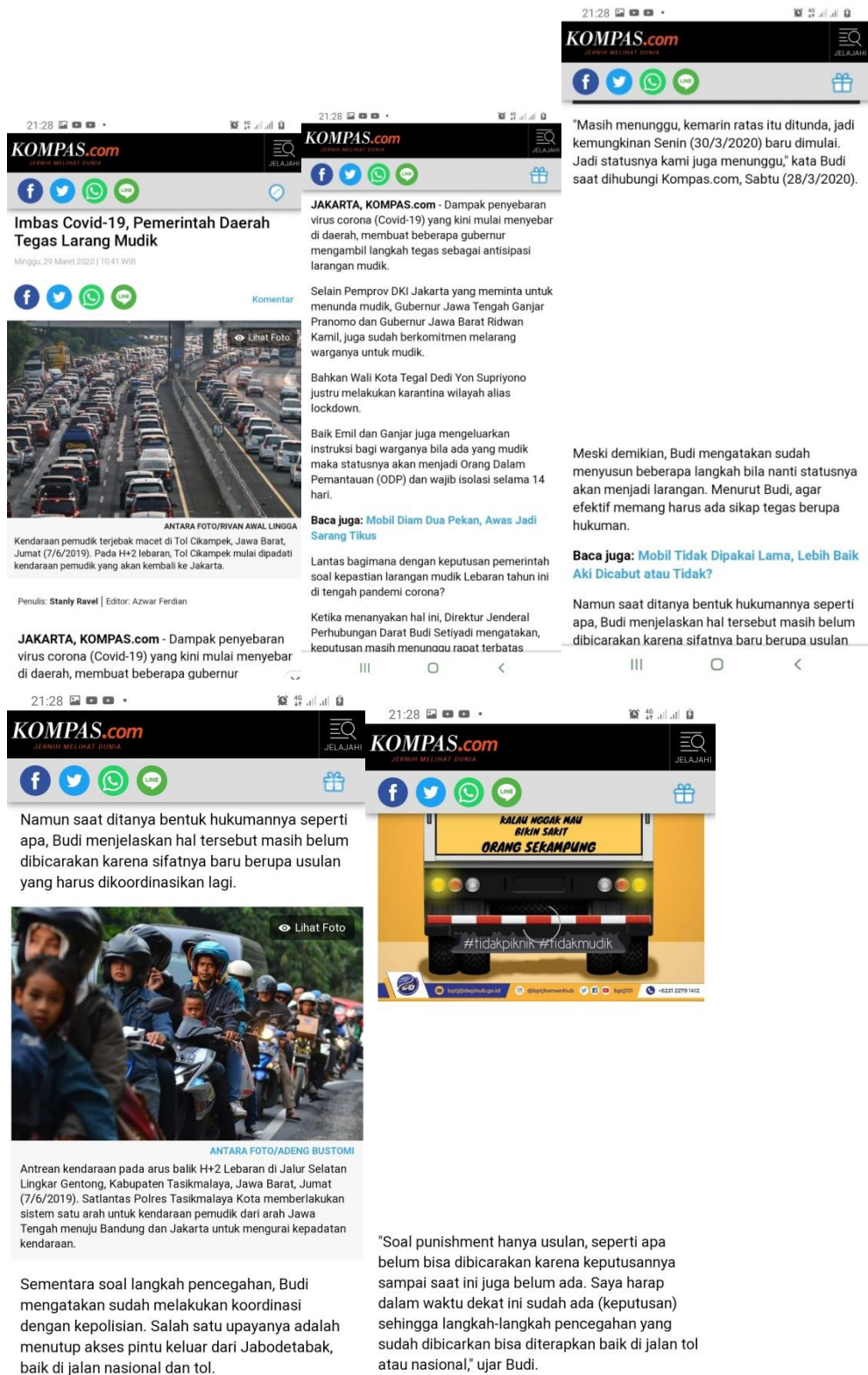
Salah satunya dengan pengawasan ketat yang dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun aparat pemerintahan.

Kabupaten Bogor Akibat Gelombang Mudik dari Jakarta, Satu Remaja Perempuan Positif Corona

Namun anjuran dilarang mudik tersebut, lanjut Jodi, masih belum tahap keputusan akhir. Sebab, akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo selaku pengambil keputusan.

"Semua ini masih belum ada keputusan final menunggu kondisi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri," ujarnya.

Berita 4



21:28 2020

KOMPAS.com
JERINIH MELIHAT DUNIA

Imbas Covid-19, Pemerintah Daerah Tegas Larang Mudik

Minggu, 29 Maret 2020 | 10:41 WIB

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA

Kendaraan pemudik terjebak macet di Tol Cikampek, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Pada H+2 lebaran, Tol Cikampek mulai dipadati kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta.

Penulis: Stanly Ravel | Editor: Azwar Ferdian

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak penyebaran virus corona (Covid-19) yang kini mulai menyebar di daerah, membuat beberapa gubernur mengambil langkah tegas sebagai antisipasi larangan mudik.

Selain Pemprov DKI Jakarta yang meminta untuk menunda mudik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga sudah berkomitmen melarang warganya untuk mudik.

Bahkan Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono justru melakukan karantina wilayah alias lockdown.

Baik Emil dan Ganjar juga mengeluarkan instruksi bagi warganya bila ada yang mudik maka statusnya akan menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib isolasi selama 14 hari.

Baca juga: Mobil Diam Dua Pekan, Awas Jadi Sarang Tikus

Lantas bagaimana dengan keputusan pemerintah soal kepastian larangan mudik Lebaran tahun ini di tengah pandemi corona?

Ketika menanyakan hal ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, keputusan masih menunoo raat terbatas

"Masih menunggu, kemarin ratas itu ditunda, jadi kemungkinan Senin (30/3/2020) baru dimulai. Jadi statusnya kami juga menunggu," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/3/2020).

Meski demikian, Budi mengatakan sudah menyusun beberapa langkah bila nanti statusnya akan menjadi larangan. Menurut Budi, agar efektif memang harus ada sikap tegas berupa hukuman.

Baca juga: Mobil Tidak Dipakai Lama, Lebih Baik Aki Dicabut atau Tidak?

Namun saat ditanya bentuk hukumannya seperti apa, Budi menjelaskan hal tersebut masih belum dibicarakan karena sifatnya baru berupa usulan

21:28 2020

KOMPAS.com
JERINIH MELIHAT DUNIA


Namun saat ditanya bentuk hukumannya seperti apa, Budi menjelaskan hal tersebut masih belum dibicarakan karena sifatnya baru berupa usulan yang harus dikoordinasikan lagi.

ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI

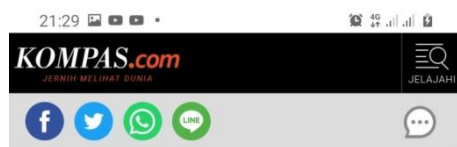
Antrean kendaraan pada arus balik H+2 Lebaran di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Satlantas Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem satu arah untuk kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Bandung dan Jakarta untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Sementara soal langkah pencegahan, Budi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian. Salah satu upayanya adalah menutup akses pintu keluar dari Jabodetabak, baik di jalan nasional dan tol.

"Soal punishment hanya usulan, seperti apa belum bisa dibicarakan karena keputusannya sampai saat ini juga belum ada. Saya harap dalam waktu dekat ini sudah ada (keputusan) sehingga langkah-langkah pencegahan yang sudah dibicarakan bisa diterapkan baik di jalan tol atau nasional," ujar Budi.



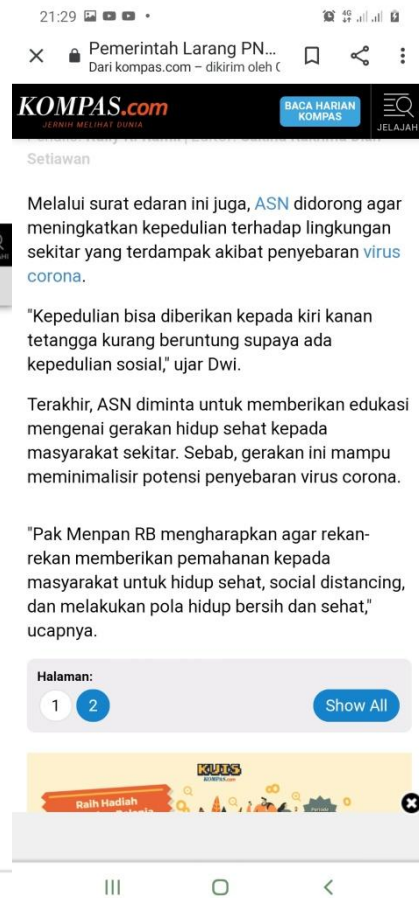
Berita 5



"Rekan-rekan ASN di seluruh Tanah Air bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak ikut mudik," katanya.

Baca juga: Erick Thohir Batalan Mudik Gratis, Dananya Digunakan Untuk Tangani Corona

Kemudian, ASN diminta memberikan pemahaman terkait pentingnya pelaksanaan social distancing dan physical distancing di masyarakat untuk memutus penyebaran virus corona.



Berita 6

21:29 Larangan Mudik Berlaku...
Dari Kompas.com - dikirim oleh C

KOMPAS.com
JELAJAHI

Larangan Mudik Berlaku Hari Ini, Pergerakan Kendaraan Bakal Dibatasi

Jumat, 24 April 2020 | 06:52 WIB

Komentar



KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Kendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati jalan tol Jakarta-Cikampek di Cikampek, Jawa Barat, Minggu (2/6/2019). Sistem satu arah atau one way mulai diterapkan di jalan tol Jakarta-Cikampek hingga tol Batang-Semarang di Jawa Tengah pada H-6 Lebaran 2019, Kamis (30/5).

Penulis: Stanly Revel | Editor: Aditya Maulana

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan mudik resmi diterapkan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, aturan larangan mudik dengan menerapkan pembatasan transportasi umum atau pribadi akan diterapkan mulai Jumat (24/4/2020) pukul 00.00 WIB.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, larangan mudik ini berlaku untuk semua moda transportasi yang ada di Indonesia, mulai dari transportasi laut, udara, darat, hingga kereta api.

Namun demikian, aturan ini dikecualikan hanya untuk angkutan logistik atau kebutuhan pokok lainnya.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperpanjang 28 Hari, Pelanggar Bakal Ditindak Tegas

"Peraturan ini mulai berlaku 24 April pukul 00.00 WIB. Perlu kami tegaskan tidak ada penutupan jalan nasional maupun tol, tapi yang dilakukan adalah penyekatan kendaraan melintas atau tidak," ucap Adita dalam konferensi pers melalui video, Kamis (23/4/2020).




21:30

KOMPAS.com
JELAJAHI

Lebih lanjut, Adita mengatakan, dengan adanya aturan ini, transportasi umum maupun pribadi tidak diperbolehkan keluar atau masuk ke wilayah yang sudah menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Aturan larangan mudik ini akan berlaku berbeda antara moda transportasi satu dan lainnya. Untuk transportasi darat, larangan mudik berlaku hingga 31 Mei 2020, transportasi udara 1 Juni, dan transportasi laut 8 Juni, sedangkan untuk kereta api hingga 15 Juni.

Baca juga: Besok Dilarang Mudik, 25.000 Unit Lebih Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek




ANTARA FOTO/DZIKI OKTOMAUJIYADI

Sejumlah pemudik bersepeda motor dari Pulau Sumatera meninggalkan kapal ro-ro di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (9/6/2019). Puncak arus balik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada H+4 hari Minggu (9/6) karena para pemudik akan kembali bekerja pada hari Senin (10/6).

Adita menegaskan, pemberlakuan larangan tersebut akan berlaku dinamis, artinya akan disesuaikan mengikuti kondisi dan situasi.

"Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kemenhub bersama kementerian terkait juga telah dan akan berkoodinasi untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini," ujar Adita.



Berita 7

21:30

Larangan Mudik Lebaran...
m.detik.com

21:30

Home Ekonomi Bisnis Finansial Infrastruktur Pro

detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis

Larangan Mudik Lebaran Dikaji, Bagaimana Dampak ke Ekonomi?

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 25 Mar 2020 12:46 WIB

Mudik Lebaran/Foto: Jhoni Hutapea/detik.com

Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan melarang masyarakat mudik Lebaran demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Pasalnya kegiatan mudik dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Seperti yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tahun lalu, bahwa momentum Lebaran bisa mendorong konsumsi. Khususnya mudik melalui jalur darat yang melewati sejumlah daerah diyakini membawa berkah bagi ekonomi sekitar.

"Kita berharap Lebaran ini bisa dimanfaatkan, kalau kita lihat perjalanannya masyarakat banyak yang menggunakan jalan darat, spill over-nya kepada ekonomi di masing-masing kota tujuan diharapkan lebih banyak," kata Sri

Lalu bagaimana jika mudik tahun ini dilarang karena mempertimbangkan wabah virus corona?

Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan, pemerintah pastinya sudah memperhitungkan dampak dari kebijakan tersebut jika jadi dilakukan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, menurutnya juga intens berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Baca juga:
[Skenario Larangan Mudik Lebaran Lagi Digodok](#)

"Ya memang sekarang semua ekonomi di dunia mengalami tekanan. Tapi Pak Luhut setuju saya sering melakukan komunikasi intens dengan Gubernur BI dan Menteri Keuangan untuk membahas berbagai potensi dampak terhadap perekonomian Indonesia dan langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan," kata dia dalam konferensi video kepada wartawan yang dikutip Rabu (25/3/2020).

21:31

detikfinance

Home Ekonomi Bisnis Finansial Infrastruktur Pro

Menurutnya hingga saat ini pemerintah sudah menyiapkan berbagai stimulus untuk membantu masyarakat.

"Berbagai fiskal stimulus sudah disiapkan oleh BI dan Kementerian Keuangan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang menurut saya ini sangat penting karena konsumsi domestik merupakan salah satu penopang GDP kita yang terbesar," tambahnya.

Kembali ke dampak mudik bagi perekonomian, Sri Mulyani juga pernah mengatakan kemacetan di jalur mudik sudah berkurang sehingga masyarakat bisa mengalokasikan uang untuk silaturahmi di kampung halaman.

"Saya rasa sesudah hari ini mereka punya banyak waktu untuk ketemu dengan teman, handai taulan dan keluarga, oleh karena itu mereka pasti akan mencari berbagai aktivitas dan acara yang bisa menyebabkan dampak untuk denyut ekonomi diharapkan mulai terjadi sampai seminggu ke depan," kata dia.

Baca juga:
[Tiga Skenario Mudik Lebaran Digodok, Ada Opsi Larangan](#)

berita 8

21:31 ·

Kemhub Minta Masy...
m.detik.com

Home Ekonomi Bisnis Finansial Infrastruktur Pro

Kemhub Minta Masyarakat Tidak Mudik, Lebaran Bisa Video Call

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 25 Mar 2020 14:03 WIB



Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi/Foto: Eva Safitri/detikcom

Jakarta - Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Imbauan itu diambil Kementerian Perhubungan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan imbauan itu diambil dalam rangka mencegah penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.

21:32 ·

Home Ekonomi Bisnis Finansial Infrastruktur Pro

keluarga," terangnya.

Menurut Budi, dengan tidak melakukan mudik atau berkunjung ke keluarga saat Lebaran sudah cukup membantu pemerintah dalam rangka memotong penyebaran wabah COVID-19.

"Kita harus bahu membahu antara pemerintah pusat dan daerah termasuk masyarakat untuk kompak mencegah penyebaran COVID-19 ini," tutupnya.

Baca juga:
[Larangan Mudik Lebaran Dikaji, Bagaimana Dampak ke Ekonomi?](#)

21:32 ·

Home Ekonomi Bisnis Finansial Infrastruktur Pro

"Dari hasil diskusi dan rapat-rapat kita dengan beberapa kementerian dan lembaga termasuk eselon 1 di kementerian perhubungan, bahwa kegiatan mudik di 2020 ini nampaknya kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah," ujarnya dalam keterangan video Kemenhub, Rabu (25/3/2020).

Baca juga:
[Mudik Gratis dari Kemenhub Batal Gara-gara Corona](#)

Budi mengatakan, Kemenhub dengan kementerian terkait serta Kepolisian akan menyampaikan imbauan secara luas kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik tahun ini. Pemerintah mengimbau agar silaturahmi dilakukan melalui media elektronik seperti video call.

"Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, nanti akan bersama-sama dengan kementerian terkait dan kepolisian kita akan mengimbau kepada masyarakat untuk Lebaran di 2020 untuk tidak melaksanakan mudik. Kemudian kita akan melaksanakan silaturahmi hanya dari tempat masing-masing. Kita bisa menggunakan WA bisa video call dengan keluarga," terangnya.

21:32 ·

Home Ekonomi Bisnis Finansial Infrastruktur Pro

keluarga," terangnya.

Menurut Budi, dengan tidak melakukan mudik atau berkunjung ke keluarga saat Lebaran sudah cukup membantu pemerintah dalam rangka memotong penyebaran wabah COVID-19.

"Kita harus bahu membahu antara pemerintah pusat dan daerah termasuk masyarakat untuk kompak mencegah penyebaran COVID-19 ini," tutupnya.

Baca juga:
[Larangan Mudik Lebaran Dikaji, Bagaimana Dampak ke Ekonomi?](#)

Berita 9

21:33

detiknews

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasio

Penjelasan Terbaru Kemenhub soal Larangan Mudik Cegah Corona ke Jokowi

Tim detikcom - detikNews

Jumat, 27 Mar 2020 15:06 WIB

Foto ilustrasi: DKI tanggap darurat Corona, para perantau dari Jabodetabek mudik ke Wonogiri (Aris Arianto/detikcom)

Jakarta - Kementerian Perhubungan akan merekomendasikan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemenhub menjelaskan pertimbangan dan langkah penanganannya.

Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara Menteri Perhubungan (Menhub) Adita Irawati dalam jumpa pers virtual Kemenhub, Jumat

Baca juga:
Istana Masih Kaji Larangan Mudik saat Wabah Corona: Diputuskan Presiden

"Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Dirjen (Perhubungan Darat) pada dasarnya sudah mencakup semua yang dibahas secara maraton dalam beberapa hari terakhir bersama Plt Menhub dan juga kemarin ada lembaga dari lintas kementerian," ujar Adita.

"Pada intinya pemerintah akan melarang mudik tetapi ini butuh persetujuan, butuh keputusan yang lebih tinggi nantinya di rapat terbatas," sambungnya.

Adita menjelaskan pertimbangannya, salah satunya untuk menekan penyebaran virus Corona.

Berikut penjelasan Kemenhub yang merekomendasikan 'larangan' mudik cegah Corona ke Jokowi:

Kemenhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Tahun Ini:

9

21:34

Penjelasan Terbaru Ke...
m.detik.com

detiknews

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasio

Foto ilustrasi: DKI tanggap darurat Corona, para perantau dari Jabodetabek mudik ke Wonogiri (Aris Arianto/detikcom)

Menekan penyebaran Corona

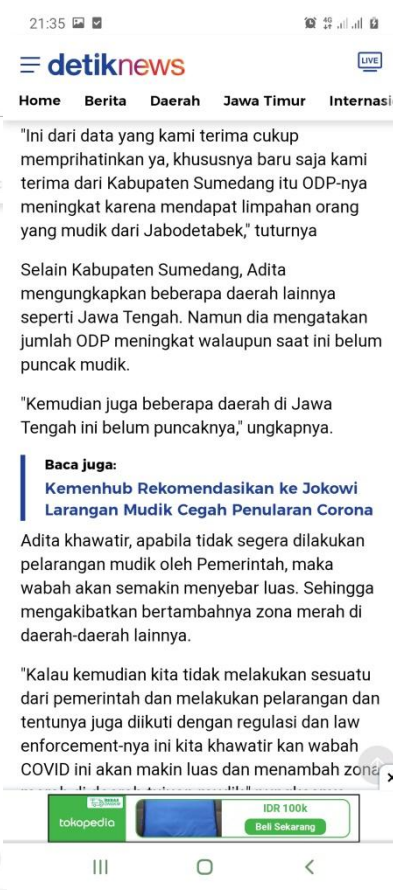
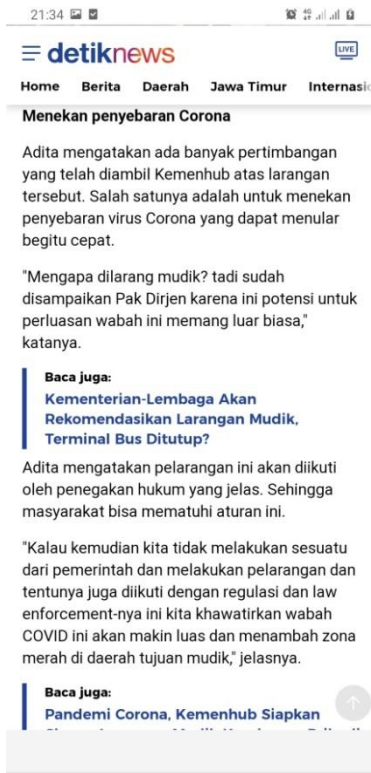
Adita mengatakan ada banyak pertimbangan yang telah diambil Kemenhub atas larangan tersebut. Salah satunya adalah untuk menekan penyebaran virus Corona yang dapat menular begitu cepat.

"Mengapa dilarang mudik? tadi sudah disampaikan Pak Dirjen karena ini potensi untuk perluasan wabah ini memang luar biasa," katanya.

Baca juga:
Kementerian-Lembaga Akan Rekomendasikan Larangan Mudik, Terminal Bus Ditutup?

Adita mengatakan pelarangan ini akan diikuti oleh penegakan hukum yang jelas. Sehingga masyarakat bisa mematuhi aturan ini.

"Kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu dari pemerintah dan melakukan pelanggaran dan



Sekat kendaraan pribadi tidak keluar Jakarta

Pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk larangan mudik lebaran bagi warga yang menggunakan kendaraan pribadi di tengah pandemi COVID-19.



Salah satu skemanya adalah kemungkinan Kemenhub bersama dengan TNI-Polri membuat sekat agar kendaraan pribadi tak keluar dari Jakarta.

"Sama juga, nanti konsekuensi, kalau memang pemerintah Pak...hasil keputusan rapat terbatas dilarang ya mungkin nanti dari TNI-Polri sama mungkin kita Kementerian Perhubungan pasti akan membuat sekat untuk mobil keluar dari Jakarta."

Jakarta tidak boleh," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi saat dihubungi, pada Kamis (26/3) malam.

Baca juga:
Kemenhub Rekomendasikan ke Jokowi Larangan Mudik Cegah Penularan Corona

Bila keputusan pemerintah pusat melarang warga mudik, Budi mengatakan Kemenhub telah menyiapkan titik sekat kendaraan pribadi. Semisal jalan mengarah ke Merak, Bogor, dan Bekasi.

"Yang pasti kita lagi menyiapkan, paling ke Merak, ke Bogor, yang jalan tol, mungkin yang jalan nasional biasa Bekasi, Kerawang, itu nanti kita tutup," ujarnya.

Budi mengatakan Kemenhub menyiapkan sejumlah skema selain penyekatan kendaraan pribadi bila pemerintah memutuskan ada larangan mudik. Skema itu adalah pengurangan angkutan umum untuk mudik dan tak dilaluinya tol saat mudik.

Selanjutnya >

RT/RW tahan masyarakat mudik

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi meminta jajaran RT/RW (Rukun Tetangga-Rukun Warga) untuk ikut menahan masyarakatnya bepergian.



Jajaran RT-RW bisa mengakomodir bantuan atau insentif dari masyarakat yang mampu untuk diberikan kepada para pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan karena Corona. Bantuan itu dinilai bisa membujuk perantau yang bekerja di sektor informal untuk tidak mudik. Tak perlu menunggu insentif dari pemerintah.



tidak mudik. Tak perlu menunggu insentif dari pemerintah.

"Jadi ini insentif juga bisa dari masyarakat, misalnya bagi masyarakat yang mampu, bantu lingkungannya. Mungkin di tingkat RT/RW yang bisa mengakomodir bisa saja mereka membujuk orang yang mau mudik, khususnya yang kerja di sektor informal untuk tidak pulang," kata Budi lewat video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

Baca juga:
Cegah Masyarakat Mudik, Kemenhub Minta Bantuan RT-RW

"Dikasih insentif sembako atau lainnya, kasih dia kegiatan untuk dapatkan makan dan pendapatan," ungkapnya.

Menurut Budi untuk mencegah orang mudik bukan cuma dibutuhkan larangan plus hukuman untuk yang melanggar. Harus ada ganjaran bagi mereka yang tidak mudik, apalagi bagi perantau yang bekerja di sektor informal.

"Kalau mau pelarangan itu butuh reward punishment. Kalau mudik akan dapat hukuman apa, dan kalau mereka yang tidak mudik, mungkin sektor informal, diarahkan untuk dapat bantuan," ungkap Budi.



kegiatan untuk dapatkan makan dan pendapatan," ungkapnya.

Menurut Budi untuk mencegah orang mudik bukan cuma dibutuhkan larangan plus hukuman untuk yang melanggar. Harus ada ganjaran bagi mereka yang tidak mudik, apalagi bagi perantau yang bekerja di sektor informal.

"Kalau mau pelarangan itu butuh reward punishment. Kalau mudik akan dapat hukuman apa, dan kalau mereka yang tidak mudik, mungkin sektor informal, diarahkan untuk dapat bantuan," ungkap Budi.

Dengan melibatkan bantuan masyarakat yang mampu dan dikoordinir oleh jajaran RT/RW, insentif untuk warga yang membutuhkan tak perlu menunggu dari pemerintah.

Tampilkan Semua

Artikel Selanjutnya
Ketua IDI Papua Barat Gugur Akibat Corona. Kisah Bareng Istri Bikin Terenyuh



Berita 10



Gedung Kemenhub (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal larangan mudik Lebaran tahun ini. Peraturan tersebut untuk mencegah penyebaran virus Corona.

"Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19," kata Juru Bicara (Jubir) Kemenhub



Aditia Irawati dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube BNPB, Kamis (23/4/2020).
Permenhub itu meliputi jenis transportasi darat hingga laut. Tak terkecuali kendaraan pribadi.

ADVERTISEMENT

Baca juga:
Kemenhub soal Mudik Dilarang: Jalan Nasional-Tol Tak Ditutup, Tapi Ada Penyekatan
"Adapun ruang lingkup dari peraturan ini adalah larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum, baik untuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi dan sepeda motor," ujar



23:59 2020 15:58 WIB

Kemenhub Keluarkan ...
news.detik.com

detiknews

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasional

kendaraan pribadi dan sepeda motor," ujar Adita.

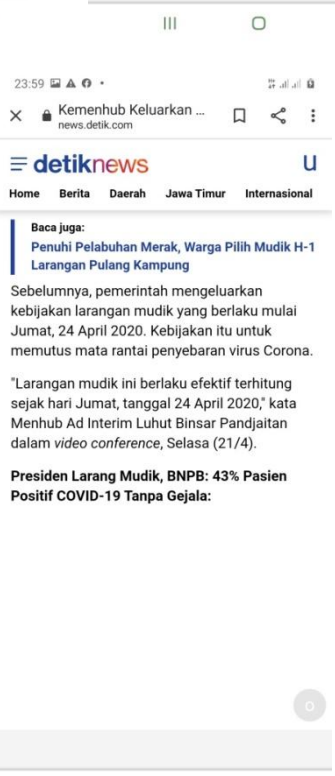
Dalam Permenhub diatur kendaraan transportasi tak diperkenankan keluar-masuk zona merah penyebaran virus Corona. Selain itu, mencakup wilayah Jabodetabek dan wilayah yang telah ditetapkan PSBB.

"Dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, wilayah zona merah penyebaran COVID-19 dan Jabodetabek atau wilayah aglomerasi lainnya yang telah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar," imbuh Adita.

Baca juga:
Penuhi Pelabuhan Merak, Warga Pilih Mudik H-1 Larangan Pulang Kampung

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang berlaku mulai Jumat, 24 April 2020. Kebijakan itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020," kata Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan



23:59 2020 15:58 WIB

Kemenhub Keluarkan ...
news.detik.com

detiknews

Home Berita Daerah Jawa Timur Internasional

Baca juga:
Penuhi Pelabuhan Merak, Warga Pilih Mudik H-1 Larangan Pulang Kampung

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang berlaku mulai Jumat, 24 April 2020. Kebijakan itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020," kata Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan dalam video conference, Selasa (21/4).

Presiden Larang Mudik, BNPB: 43% Pasien Positif COVID-19 Tanpa Gejala:

